

Rekonstruksi Penguatan Ideologi Pancasila pada Ranah Penyelenggaraan Negara (Perspektif Politik)

Sri Suneki^{1*}, Haryono²

^{1,2} Universitas PGRI Semarang, Indonesia

*Corresponding author: srisuneki@upgris.ac.id

Abstract: Building a concept of Indonesian identity that is civilized and upholds pluralism is a shared goal to be actualized. The purpose of this literacy study is to examine the reinforcement of Pancasila through a political perspective. The strengthening of the Pancasila ideology should serve as the guiding principle for state administrators in carrying out the mandate of Pancasila. The goodwill of state administrators, as part of the elite class, plays a strategic role in fostering a commitment to upholding the Pancasila ideology through adaptive regulations. The phenomenon of horizontal and vertical conflicts in society must be interpreted as a reality stemming from differences in cultural construction perspectives. Based on these conditions, from a political perspective, the Pancasila ideology serves as a foundation and ethical value system that is believed to be a source of moral and legal norms in exercising state power, as well as being capable of dissecting and resolving conflicts. Reform is inevitable; thus, both the state administrators and society must internalize and ground the Pancasila ideology as the nation's lifeblood in preserving national integration. Aligned with the vision of the Indonesian nation, it is necessary to develop a regulatory model that strengthens the Pancasila ideology, grounded in the values of wisdom, systematic dialogue, and participatory involvement of all elements of the nation.

Keywords: reconstruction; pancasila ideology; state administration; political perspective

Abstrak: Membangun konsep jati diri ke Indonesiaan yang berkeadaban dan menjunjung tinggi pluralisme menjadi tujuan bersama yang akan di aktualisasikan. Tujuan studi literasi adalah untuk melakukan kajian literasi penguatan pancasila dengan perspektif politik. Penguatan idiologi Pancasila harusnya menjadi nafas bagi penyelenggara Negara dalam menjalankan amanat Pancasila. *Good will* penyelenggara negara sebagai kelas elit memiliki peran strategis dalam membangun komitmen eksistensi ideologi Pancasila melalui regulasi yang adaptif. Fenomena konflik horizontal dan vertikal di masyarakat harus di maknai sebagai realitas dampak dari perbedaan pandangan konstruksi budaya. Berdasarkan kondisi tersebut dilihat dari persepektif politik ideologi Pancasila menjadi fondamen dan sistem nilai etik yang diyakini sebagai sumber norma moral dan norma hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara serta mampu mengurai dan menyelesaikan konflik. Reformasi adalah keniscayaan sehingga ada keharusan bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk membumikan ideologi Pancasila sebagai urat nadi bangsa dalam mempertahankan integrasi nasional. Bermuara pada visi bangsa Indonesia, diperlukan konstruksi regulasi model penguatan ideologi Pancasila yang berdasar pada nilai kearifan, gerakan dialogis yang sistematis serta partisipatoris semua elemen bangsa.

Kata kunci: rekonstruksi; ideologi pancasila; penyelenggaraan negara; perspektif politik

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang telah melalui proses pembelajaran dan penyelenggaraan politik dalam kurun waktu yang cukup panjang. Fenomena dan implikasi terhadap kondisi Indonesia ditandai dengan berbagai krisis dimensional, krisis ekonomi, krisis moral, supremasi hukum, Korupsi, kolusi dan nepotisme. Semenjak bergulirnya reformasi yang dipandang belum mampu mengubah kondisi sosial politik menjadi lebih baik. Masa transisi menuju tata politik yang demokratis seperti yang diharapkan belum memberikan perubahan hasil yang signifikan. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk tengah menghadapi tantangan serius dalam bentuk krisis multidimensi yang meliputi berbagai aspek kehidupan-politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga moral dan spiritual. Krisis ini bukan hanya persoalan ketimpangan ekonomi atau lemahnya stabilitas politik, tetapi juga mencerminkan kemunduran nilai-nilai kebangsaan dan lunturnya semangat kolektif dalam menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Fenomena ini tampak jelas dalam meningkatnya intoleransi, maraknya ujaran kebencian, polarisasi sosial, lemahnya rasa tanggung jawab warga negara, serta kecenderungan perilaku yang individualistik dan pragmatis, yang semuanya menjauh dari semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang telah menjadi karakter khas bangsa Indonesia.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara, kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang baik masih sangat bias. Proses demokrasi sampai saat ini dianggap masih terjadi distorsi dan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, demokrasi berkuat pada otoritarian. Situasi tersebut diperparah oleh deras arus globalisasi yang membawa serta ideologi-ideologi asing, gaya hidup konsumtif, serta nilai-nilai individualisme liberal yang seringkali bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Generasi muda, sebagai tulang punggung masa depan bangsa, semakin rentan terhadap disorientasi nilai, kehilangan arah dalam memaknai nasionalisme, serta cenderung mengadopsi identitas dan nilai yang tidak berakar pada budaya dan sejarah bangsa sendiri. Dalam konteks inilah, keberadaan dan peran **Pancasila** sebagai dasar negara, falsafah hidup, serta ideologi pemersatu bangsa menjadi sangat urgen dan strategis.

Pancasila tidak hanya sekadar produk sejarah, tetapi merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa terhadap realitas Indonesia yang pluralistik

dan kompleks. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila Pancasila - Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial - sejatinya menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan karakter bangsa, penguatan integrasi nasional, serta arah pembangunan yang berkeadilan dan berkepribadian. Dalam situasi krisis seperti saat ini, Pancasila menjadi jawaban atas disorientasi nilai yang melanda masyarakat. Ia hadir bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi harus diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lembaga-lembaga negara, dunia pendidikan, hingga komunitas masyarakat terkecil.

Dengan demikian, tulisan ini berangkat dari keprihatinan terhadap krisis multidimensi yang tengah melanda Indonesia, serta kegelisahan akan menurunnya kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai Pancasila. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan urgensi penguatan ideologi Pancasila sebagai solusi integral dalam menjawab tantangan kebangsaan dan membangun kembali identitas nasional yang kuat, kokoh, dan berakar pada nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Bangsa ini harus kembali pada akar ideologisnya, memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila, dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya nilai-nilai luhur tersebut dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan yang muncul. Pancasila bukan hanya alat pemersatu, tetapi juga merupakan kompas moral dan arah kebijakan dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab.

Terjadinya hiruk pikuk dan carut marutnya pelaksanaan demokrasi, membuka wacana perlunya memformat ulang demokrasi. Pemahaman terhadap nilai-nilai Ideologi Pancasila harus menjadi spirit, kualitas pribadi, dan rasa pengabdian kepada masyarakat. Spiritualitas nilai-nilai religius sesungguhnya dianggap sebagai filter yang jitu serta media akulturasi. Dalam memahami fenomena global, semua nilai-nilai dan kepentingan tidak boleh saling mengorbankan pihak yang dianggap sebagai pesaing. Semangat egalitarian dan tidak ada hegemoni serta diskriminasi disetiap elemen masyarakat akan menjadi kunci sukses penyelenggaraan negara yang baik. Yang perlu dilakukan adalah revolusi, transformasi, nilai religiusitas sebagai landasan untuk membangun *nation and character building*. Agenda menata ulang Penyelenggaraan negara yang demokratis dilakukan dengan mewujudkan *good governance*, meningkatnya partisipatoris masyarakat, serta memberikan ruang dialogis

yang sistematis.

GOOD GOVERNANCE

Pada dekade akhir tahun 90-an, Bangsa Indonesia mengalami gelombang reformasi yang membawa dampak meningkatnya tuntutan terbentuknya transformasi dan komunikasi birokrasi. Birokrasi dan tumbuhnya demokrasi membutuhkan adanya pemerintahan yang mengikutsertakan elemen masyarakat melalui birokrasi yang transparan dan akuntabel yang dapat diakses secara terbuka. *Good governance* merupakan pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, profesionalitas, dan mendapat dukungan dari masyarakat. Di tinjau dari sisi semantik, kebahasaan *governance* berarti tata pemerintahan dan *good governance* bermakna tata pemerintahan yang baik. Di satu sisi istilah *good governance* dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan (Supramudyo, 2024). Oleh karena itu *good governance* tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non - pemerintah dan sektor swasta.

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Afifah, 2023). Oleh karena itu orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung - jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi (Sasmita, 2025).

Membahas *good governance* sebagai asas Pemerintahan yang memadai, kompeten, oleh karenanya perlu dibangun institusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Adapun unsur yang dapat menentukan keberhasilan *good governance*, yaitu:

1. Pemerintahan

Tertatanya sistem pemerintahan penentu utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

2. Sektor swasta

Sektor swasta meliputi: perbankan, koperasi, industry perdagangan

3. Masyarakat

Agar terciptanya *good governance* diperlukan dukungan dan pengawasan dari masyarakat

Beberapa karakteristik dari *governance* menurut UNDP yaitu: (1) legitimasi politik, (2) kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, (3) kebebasan bersosialisasi dan berpartisipasi, (4) akuntabilitas birokratis dan keuangan (*financial*), (5) manajemen sektor publik yang efisien, (6) kebebasan informasi dan ekspresi, (7) sistem yudisial yang adil dan dapat di percaya (Widowati, 2024).

Terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: (1) partisipasi, (2) aturan hukum, (3) transparansi, (4) daya tanggap, (5) berorientasi konsensus, (6) berkeadilan, (7) efektif dan efisien, (8) akuntabilitas, (9) visi strategis. Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat dan terkait serta tidak berdiri sendiri. Sedangkan menurut *World Bank* mengungkapkan karakteristik *Good Governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Oleh karenanya diperlukan pemahaman secara komprehensif oleh semua pihak.

Dari perspektif politik penyelenggaraan negara menuju *Good governance* yang di dasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Ketiga prinsip tersebut diperlukan untuk mencapai pengelolaan publik yang baik. Oleh karenanya dituntut adanya dua hal yang sangat urgen yaitu kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*onsequence*).

Faktor yang menunjukkan bahwa yang mempengaruhi kemajuan suatu negara adalah kepiawaian suatu negara dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan beberapa data empiris misalnya: menemukan bahwa karena perbedaan *style public management*, mengakibatkan dua negara yang pada awalnya memiliki

sejarah penjajahan dan geografi yang relatif sama, akan tetapi saat ini memiliki tingkat kemajuan dan kemakmuran yang sangat berbeda.

IDEOLOGI PANCASILA

Idiologi diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai idiologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan. Sebagai dasar Negara, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasan UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara sampai saat ini tetap kokoh menjadi landasan bernegara. Pancasila harus memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, di renungkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat penyelenggara negara oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Kita harus diakui Pancasila sebagai ideologi yang mengikat warga negara Indonesia yang mejemuk.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan mampu menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek serta zaman.

Ciri khas ideologi terbuka ialah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya, masyarakat sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara. Faktor

pendorong keterbukaan ideologi Pancasila sebagaimana dijelaskan oleh Sasmita (2025), yaitu:

1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
2. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku, cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
3. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.
4. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai - nilai Pancasila yang bersifat abadi dan harap mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut :

1. Stabilitas nasional yang dinamis.
2. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.
3. Mencegah berkembangnya paham liberal.
4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus (Siregar, 2024).

Ideologi Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Pancasila merupakan dasar Negara yang mempersatukan bangsa sekaligus penuntun yang dinamis, serta mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuan. Dalam posisi tersebut, Pancasila merupakan sumber jati diri, moralitas, dan haluan keselamatan dalam penyelenggaraan Negara (Wibowo, 2023).

Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Oleh karena itu nilai - nilai Pancasila berasal dari nilai - nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat Negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan Negara. Oleh karena itu ideologi Pancasila , ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia akan semakin kukuh, apabila dalam segala komponen

memahami dan melaksanakan Ideologi Pancasila, secara konteksuen menjaga sendi - sendi utama lainnya, yakni Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dalam menyelenggarakan negara adalah tetap mempertahankan ideologi Pancasila dan dasar Negara.

Pancasila merupakan ideologi sekaligus dasar negara Indonesia dan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan sebagai budaya yang luhur dalam eksistensi kesejarahan, Pancasila menjadi gagasan dalam pembentukan budaya bangsa Indonesia. Budaya bangsa Indonesia yang Pancasilais secara eksplisit tercermin dalam pola pikir, pola sifat dan pola sikap bangsa Indonesia yang khas sehingga membentuk sebuah jati diri bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa - bangsa lainnya secara global. Karakteristik khas dan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia inilah yang menjadikan Indonesia dipandang kuat secara ideologis. Kekuatan ideologis bangsa Indonesia ini bersinggungan dengan kondisi politik global. Kultur ideologi internasional yang lebih pada penerapan ideologi sangatlah kontra produktif dengan pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

REKONSTRUKSI PENGUATAN IDEOLOGI DALAM BERNEGARA

Negara Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi masyarakat tidak hanya menjadi objek pengaturan dari pemerintah akan tetapi juga menjadi pelaku dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh karena itu peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, maka Negara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena hal tersebut merupakan hak dan tanggungjawab warga Negara untuk berperan aktif dalam mewujudkan negara dan lingkungan yang baik dan bersih sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Salah satu persoalan penting yang terkait dalam penyelenggaraan negara adalah masalah penguatan ideologi bangsa. Agenda penguatan ideologi bangsa sejak negara Indonesia merdeka hingga saat ini yaitu Indonesia memiliki sistem kemasyarakatan yang secara konstitutif telah dirumuskan dalam nilai-nilai Pancasila. Namun dalam beberapa dekade ini melalui berbagai media serta pengalaman empirik terdapat keperihatinan dan kekhawatiran terhadap gejala-gejala yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami masalah etika kewarganegaraan yang sangat serius.

Fenomena konflik horizontal dan vertikal sudah terjadi dan menjadi budaya. Pada hakekatnya bangsa Indonesia dalam mengatasi masalah etika kewarganegaraan ini terjadi dikarenakan proses Globalisasi.

Globalisasi merupakan suatu proses dari pikiran yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk di ikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada titik kesepakatan bersama dan menjadi patokan bagi Negara. Globalisasi pada hakikatnya telah membawa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera serta gaya hidup masyarakat (Harits, 2023). Adanya globalisasi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam kelangsungan penyelenggaraan Negara. Sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Dilihat dari dimensi ruang akan semakin dipersingkat dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam skala dunia. Globalisasi berlangsung pada semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, sosial, budaya dan politik.

Upaya penyelenggaraan Negara bangsa Indonesia, yang termasuk didalamnya penghargaan nilai - nilai ideologi Pancasila, dan cinta tanah air yang dirasakan semakin memudar dapat disebabkan berbagai konflik dimasyarakat. Berdasarkan fakta yang berkembang masyarakat Indonesia harus peka dan antisipatif. Penyelenggaraan Negara sebagai sebuah tawaran yang dilakukan oleh pemerintah akan solusi permasalahan kemajemukan bangsa Indonesia yang sedang dan terus berkembang. Negara dapat di pandang sebagai suatu sistem sosial, dan sistem politik. Sistem politik merupakan salah satu sub sistem sosial. Secara kuantitatif politik memiliki tingkatan makro, mezzo, dan mikro. Artinya sistem politik dapat dilihat dari ukuran besar atau kecilnya suatu ruang lingkupnya. Sehingga lazim dikenal sebagai sistem politik regional serta politik Nasional.

Untuk meningkatkan pengetahuan ideologi Pancasila masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Jika dikaitkan dengan faham penyelenggaraan negara atau kedaulatan rakyat, maka rakyat harus mampu menjalankan tugas atau partisipasi. Pada negara Indonesia yang demokrasi idealnya masyarakat harus dididik secara kontinu berdasarkan nilai - nilai yang di junjung tinggi Negeranya.

Adanya petugas-petugas politik yang berkualitas tinggi hampir selalu merupakan hasil dari pendidikan politik. Hendak kemana masyarakat akan di didik tentang pemikiran-pemikiran politik, daya tanggap politik sangat erat dengan masalah-masalah politik serta adanya kebudayaan politik dan orientasi-orientasi politik menampilkan budaya politik partisipan yang sangat penting, karena akan berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi yang nyata pada negara Indonesia.

Kualitas tata pemerintah harus di kelola dengan baik, reformasi publik merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tata kepemimpinan yang baik merupakan jaminan penting dari pemerintah untuk menentukan aktivitas politik dan ekonomi yang dapat menguntungkan kelompok, individu, dan akan berujung tidak terciptanya pelayanan publik yang di butuhkan masyarakat (Widowati, 2024).

Penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan nilai - nilai *good governance*, mislanya: *governance*, efektivitas, transparansi, responsifitas, dan akuntabilitas. Dalam realitas sosial budaya yang berada pada gelombang globalisasi, di tujukan penguatan ideologi melalui:

1. Mempercepat perbaikan kinerja yang menghasilkan perubahan melalui:

a. Coercive Isomorphism

Adalah perubahan yang dihasilkan oleh tekanan politik baik secara formal maupun informal yang dilakukan oleh lembaga diluar birokrasi.

b. Nimetic Isomorphism

Adalah perubahan yang dihasilkan dari kecerdasan eksponen organisasi untuk merespon ketidakpastian dan keterbatasan.

c. Normatif Isomorphism

Yaitu perubahan organisasi yang berhubungan dengan proses profesionalisme. (Hidayat & Pambudi, 2023)

2. Reformasi sistem penyelenggaraan negara

3. Pemberantasan korupsi.kolusi.nepotisme

4. Reformasi implementasi ideologi dalam kebijakan pemerintah

5. Rekonstruksi penyusunan program dalam mewujudkan visi Indonesia emas

6. Memformat ulang demokrasi

SIMPULAN

Perkembangan zaman dalam era global memberi dampak perubahan masyarakat yang kompleks. Indikasi dari perkembangan tersebut antara lain terjadinya interaksi yang semakin global, informasi yang mengalir deras, kebutuhan kerjasama dan kompetisi. Globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma peran Negara, dari kontrol ke regulasi dengan menekankan akuntabilitas dan transparansi serta menjadi perlindungan *public goods*.

Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada demokrasi, memerlukan terobosan politik dan alternatif birokrasi yang tetap menekankan nilai - nilai Ideologis. Ideologi Pancasila memberi ruang bagi penyelenggara Negara dapat digunakan untuk berexplorasi dan berinovasi tanpa menyinggalkan nilai ideal dan nilai fundamental.

Globalisasi menyebabkan gelombang keragaman, maka kita harus mampu menafsir dan memahami fenomena disetiap perubahan kultur sosial. Oleh karena itu dalam perspektif politik, harus dilakukan regulasi untuk memformat dan merenkonstruksi dalam memperkuat ideologi bangsa dengan cara membangkitkan kapabilitas dinamis dalam menyelenggarakan negara yang di dukung oleh seluruh rakyat, agar kebijakan yang dibuat dan dijalankan sesuai dengan rambu - rambu nilai Pancasila.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, S. N., Nurachadijat, K., & Fauziah, S. U. (2023). Ethics of Learning in Philosophy Perspective. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 8(2), 156–165.
- Harits, M. N. (2023). Pancasila dalam Konteks Pluralisme dan Tantangan Global. *Jurnal Filsafat Dan Kebangsaan*, 7(2), 110–125.
- Hidayat, D. C., & Pambudi, A. R. (2023). Public Administration and Contemporary Governance: Challenges and Practices in Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 85–101.
- Sasmita, S. K., Handayani, D., & Hariyanti. (2025). Efforts to Strengthen Pancasila as a State Ideology through an Educational Approach. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i1.65151>
- Siregar, I. (2024). The Errors of the Democratic System According to Pancasila: A Critical Examination of Governance in Indonesia. *Polit*, 4(2), 123–134. <https://doi.org/10.33258/polit.v4i2.1158>
- Supramudyo, G. T., Irianto, J., Setijaningrum, E., & Bahar, A. A. (2024). The Role of Pancasila Ideology in Legitimizing Public Policies during the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 1–10.

Wibowo, E. (2023). Revitalisasi Pendidikan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 28(1), 50–62.

Widowati, L., Setyowati, K., & Suharto, D. G. (2024). Dynamic Governance as a Perspective in Indonesian Bureaucracy Reform. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 45–60.